

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
BLOOMBANG WATER PARK AYODYA NGLEJOK-KURIPAN
TENTANG
PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DALAM PELAYANAN DI BLOOMBANG WATER PARK AYODYA
NGLEJOK KELURAHAN KURIPAN

Nomor : 471.1/295/2020

Nomor :

Pada hari ini **Rabu** tanggal **lima** bulan **Pebruari** tahun **dua ribu dua puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH. SUSILO, S.H., M.M.**
Alamat : Jalan dr. Sutomo Nomor 5 Telp./ Fax. (0292) 421940
Kalongan 58114
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **SUPARJO**
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Kuripan - Purwodadi
Jabatan : Kepala Unit Bloombang Water Park Ayodya Nglejok
Kelurahan Kuripan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bloombang Water Park Ayodya Nglejok Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan sebagai instansi pelaksana di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati, berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan dokumen kependudukan diantaranya adalah Kartu Identitas Anak (KIA);
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit usaha kolam renang dengan berbagai macam permainan air di bawah pengelolaan PT. Ayodya Bersemi Purwodadi; Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

- 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan di Bloombang Water Park Ayodya Nglejok Kelurahan Kuripan, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat **KIA** adalah identitas resmi anak sebagai bukti dirinya yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua pihak untuk melaksanakan kerja sama yang diselenggarakan atas dasar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak dalam rangka pemenuhan hak anak;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Menjalin hubungan kerja sama yang baik, harmonis dan saling menguntungkan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagai **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra layanan KIA;
 - b. Memberikan pelayanan kepada anak yang memiliki KIA guna mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan KIA dalam layanan di Bloombang Water Park Ayodya Nglejok Kelurahan Kuripan

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Menerbitkan dan mendistribusikan KIA;
 - b. Melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat Kabupaten Grobogan untuk mitra layanan KIA secara tatap muka, pemasangan banner/spanduk, penyampaian brosur/leaflet, iklan radio serta media sosial.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban memberikan **potongan harga tanda masuk sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)** bagi penduduk Kabupaten Grobogan yang memiliki dan membawa KIA serta memperlihatkannya pada saat membeli tiket masuk di Bloombang Water Park Ayodya Nglejok Kelurahan Kuripan **pada hari Minggu di minggu terakhir setiap bulannya;**
- (3) Pemberian potongan harga pembelian tersebut dalam ayat (2) **hanya berlaku untuk anak yang membawa KIA dan menunjukkannya pada waktu membeli tiket tanda masuk.**

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak mendapatkan informasi dan keterangan mengenai detail pemberian fasilitas potongan harga bagi pemegang KIA;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan informasi tentang sejauh mana penyebaran informasi dan promosi tentang layanan pemanfaatan KIA yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA.**

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini **berlaku selama 1 (satu) tahun** dimulai pada tanggal **05 Pebruari 2020 s/d 04 Pebruari 2021** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan diberikan kepada **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUPARJO

PIHAK KESATU



MOCH. SUSILO, S.H., MM.